ANALISIS PENGELOLAAN DAN FINANSIAL HUTAN RAKYAT KEMITRAAN DI KABUPATEN BULUKUMBA, PROPINSI SULAWESI SELATAN

(*Analysis of Private Forest Management Partnership and Financial in Bulukumba Regency, South Sulawesi Province*)

Oleh/*By* :
Priyo Kusumedi[1]&Ani Nawir[2]
[1]BPK Solo, Jl.Jend.Ahmad Yani-Pabelan Kartasura. Tlp. (0271) 716709, Fax 716959
e-mail: p_kusumedi@yahoo.com
[2]CIFOR, Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor Barat 16680, Indonesia,Tlp.(0251) 622 622, Fax 622 100
e-mail: a.nawir@cgiar.organi.&adiwinata@anu.edu.au

ABSTRACT

Cost-benefit analysis (CBA) was used to find the essential problems in private forest management, as well as to provide input in implementing a mutual benefit partnership program. The research was conducted in participative means in order to collect deep information with a case study approach. Primary data was collected through structural interviews and Focus Group Discussion (DKT), also secondary data was collected from related institution, financial analysis was focused to analyze cost-benefit with market value. Result of business feasibility of community forest in three samples of Forest Farmer Groups (KTP) in two villages and two subdistrict of Bulukumba showed that 'KTP Pembangunan Bersama' from Balong Village, Ujungloe Subdistrict was financially suitable despite the fact that calculation result wasn't profitable or equivalent of cost spent and the result gained, on the other hand, 'KTP Suka Maju' and 'Suka Makmur' in Karasing Village, Herlang Subdistrict, was financially unsuitable.

Keyword: *Partnership, private forest, cost-benefitl analysis*

ABSTRAK

Analisa biaya-manfaat digunakan untuk menemukan berbagai persoalan mendasar dalam pengelolaan hutan rakyat, serta memberi masukan dalam pelaksanaan program kemitraan yang saling menguntungkan. Penelitian dilaksanakan secara partisipatif untuk mendapatkan informasi yang mendalam dengan pendekatan studi kasus. Menggunakan data primer melalui wawancara terstruktur dan Diskusi Kelompok Terpokus (DKT), serta data sekunder dari instansi terkait, analisa finansial difokuskan untuk menganalisa biaya dan manfaat yang mempunyai nilai pasar. Hasil kelayakan usaha hutan rakyat di tiga sampel Kelompok Tani Penghijauan (KTP) di dua desa dan dua kecamatan, Kab. Bulukumba yang layak secara finansial adalah KTP Pembangunan Bersama desa Balong Kec. Ujungloe meskipun hasil perhitungannya belum menguntungkan atau masih sebanding antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang didapatkan, sedangkan KTP Suka Maju dan Suka Makmur di desa Karasing, Kec. Herlang tidak layak secara finansial.

Kata kunci: Kemitraan, analisis manfaat-biaya, hutan rakyat

I. PENDAHULUAN

Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,67 km^2 atau 1,85% dari luas Propinsi Sulawesi Selatan dan secara administrasi pemerintahan terbagi menjadi 10 kecamatan dengan 125 desa dan kelurahan. Secara keseluruhan luas hutan berdasarkan penggunaan di Kabupaten Bulukumba terdiri dari hutan lindung seluas 3.553 ha (11%), hutan produksi terbatas seluas 509 ha (2%), hutan suaka alam seluas 3.475 ha (11%), hutan produksi seluas 931 ha (3%), hutan rakyat seluas 21.843 ha (71%), dan hutan bakau (mangrove) yaitu jalur perlindungan 503,1 ha dan jalur budidaya 262,15 ha atau sekitar 2% (Dinas Kehutanan Kab.Bukukumba, 2005). Dari distibusi luas lahan di atas yang terbesar adalah hutan hak atau hutan rakyat, dimana hampir 71% luas kawasan hutan merupakan lahan milik. Hal ini membutuhkan pendekatan yang lebih spesifik agar kelestarian hasil hutan rakyat dapat tercapai untuk menopang hutan negara sebesar 29% dan kebutuhan industri primer/sekunder serta kebutuhan masyarakat secara luas.

Sekitar 83% dari total luas kawasan hutan dalam keadaan kritis dan telah dirambah, terdapat lahan kritis di dalam dan diluar kawasan seluas 20.197 ha, sementara lahan kritis yang ada di hutan rakyat seluas 5.680 ha dan hutan bakau seluas 125 Ha. Kondisi tersebut membutuhkan upaya rehabilitasi hutan dan lahan dari dinas terkait dan pihak terkait lainnya untuk mengembalikan tata guna lahan dan menjaga fungsi hutan tetap lestari. Hutan rakyat di Kabupaten Bulukumba sampai tahun 2005, terdapat pada 9 kecamatan yaitu ; 1) Gantarang seluas 1.591,50 ha (7%), 2) Ujung Loe seluas 1.267,90 ha (7%), 3) Bontobahari seluas 4.280,85 ha (20%), 4) Bontotiro seluas 1.576,15 ha (7%), 5) Herlang seluas 1.684,65 ha (8%), 6) Kajang seluas 2.289,35 ha (10%), 7) Bulukumpa seluas 3.448,90 ha (16%), 8) Rilau Ale seluas 2.826,1 ha (13%) dan 9) Kindang seluas 2.667,60 ha (12%) (Dinas Kehutanan Kab.Bulukumba, 2005).

Dari kondisi tersebut pasokan kayu rimba campuran di Kabupeten Bulukumba sebagian besar berasal dari hutan rakyat dan sisanya berasal dari luar Kabupaten. Perkiraan jumlah kayu hasil hutan rakyat dengan luas 21.843 ha sebesar 22.942 m^3 dari luas 267,6 ha yang merupakan Ijin Pemungutan Kayu Hutan Rakyat (IPKHR). Kebutuhan bahan baku industri kayu (saw mill) sebesar 24.228 m^3 dan kebutuhan PT.Palopo Alam Lestari (PT.PAL/industri veneer) sebesar 3.200 m^3 yang berasal dari hasil hutan kayu rakyat di Bulukumba. Hal ini menyebabkan adanya kekurangan pasokan sebesar kurang lebih 5.585 m^3/th. Sisa kekurangan bahan bakunya berasal dari re-planting kayu karet dari PT.Londsum sekitar 15.200 m^3 – 12.000 m^3.

Disisi lain kondisi tersebut tidak didukung oleh ketersediaan bibit yang cukup dan berkualitas. Selain itu penatausahaan hasil hutan rakyat (peredaran kayu) menjadi kendala tersendiri karena banyaknya peraturan daerah yang membuat disinsentif untuk perkembangan pembangunan hutan rakyat. Dari kondisi tersebut maka diperlukan analisis untuk mengetahui apakah pengelolaan hutan rakyat kemitraan di Kabupaten Bulukumba menguntungkan atau tidak. Kajian ini bertujuan untuk menghitung keuntungan dalam usaha hutan rakyat, faktor-faktor apa yang mempengaruhi usaha HR menjadi (lebih) menguntungkan semua pihak secara merata dan biaya-biaya apa saja yang harus di tanggung oleh pihak-pihak yang terlibat dalam hutan rakyat, dan bagaimana mengatasi biaya yang tinggi.

II. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan tempat

Penelitian ini dilaksanakan atas kerjasama ACIAR-FORDA dan CIFOR pada tahun 2005-2007. Penelitian aspek analisis finansial dilaksanakan pada tahun 2007 dan mengambil lokasi di 3 Kelompok Tani Penghijauan (KTP) yaitu di Desa Balong Kecamatan Ujung Loe (KTP Pembangunan Bersama), Desa Karassing Kecamatan Herlang (KTP Suka Maju dan KTP Suka Makmur), Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive pada tiga Kelompok Tani Penghijauan (KTP) yang ada di dua desa lokasi kajian yang dianggap mewakili karakteristik dari pengelolaan hutan rakyat yang ada di Kabupaten Bulukumba sehingga kesimpulan terhadap populasi dapat dipertanggungjawabkan. Sampling dilakukan untuk semua pihak yang bermitra: masyarakat, perusahaan, mitra antara, Dinas Kehutanan dan juga non-peserta mitra

B. Bahan dan Peralatan

Bahan dan peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut; alat tulis menulis, alat perekam (minitape recorder), peta lokasi, kuisioner, kamera, monografi Desa Balong dan Desa Karassing, Bulukumba Dalam Angka tahun 2006 serta perlengkapan lapangan lainnya.

C. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi :

a) *Desk study* dengan bahan referensi hasil-hasil penelitian yang telah ada tentang pembanguanan hutan rakyat di Kabupaten Bulukumba serta produk-produk peraturan perundangan yang berkaitan dengan hutan rakyat.
b) Survai dalam rangka pengumpulan data kuantitatif dan data kualitatif berupa pendapat pejabat kunci pada instansi terkait seperti KTP Suka Maju, KTP Suka Makmur dan KTP Pembangunan Bersama dan masyarakat, Mitra Antara, PT. PAL, Dinas Kehutanan dan instansi terkait lainnya dalam rangka validasi. Survai dilakukan dengan instrumen kuesioner dengan metode wawancara mendalam (in depth interview) dengan responden. Pengambilan sample dilakukan dengan menggunakan kerangka sampling (sampling frame) yakni anggota kelompok tani penghijauan (KTP) di dua desa sebanyak tiga KTP (2 KTP di Desa Karassing, Kecamatan Herlang dan 1 KTP di Desa Balong, Kecamatan Ujungloe) yang terlibat dalam embrio kemitraan, dengan tetap memperhatikan peluang keterwakilan masing-masing kelompok masyarakat melalui stratifikasi sampling pada responden yang terpilih dengan intensitas sampling yang digunakan yakni 5% dari total populasi.
c) Wawancara (konsultasi) dan DKT (*Focus Group Discussion*) dengan pihak terkait (stakeholder) yang berkaitan langsung dengan pembangunan hutan rakyat. Langkah pertama dalam upaya untuk mulai melibatkan warga desa dalam kajian kritis keberadaan mereka dalam kawasan itu adalah pengkajian lapangan yang akan dilakukan dengan berbagai teknik misalnya DKT dan PRA (*Participatory Rural Appraisal*). Selain sebagai penelitian untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, kegiatan PRA ini juga merupakan proses belajar bagi masyarakat dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk proses perundingan dan perencanaan yang selanjutnya.

Untuk melakukan triangulasi (chek and re-check) terhadap temuan sementara survai, dilakukan dengan Diskusi Kelompok Terfokus (DKT). Disamping itu, analisis ekonomi dilakukan secara bersama-sama antara tim peneliti dengan masyarakat melalui DKT.

d) Workshop

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan oleh tim peneliti dan peneliti lokal (Dinas Kehutanan). Beberapa jenis data yang diambil dalam penelitian antara lain;

1. Data Primer

Data primer dikumpulkan langsung di lapangan dari sumber data pertama, baik melalui wawancara, maupun teknik survei maupun non-survai dan memerlukan validitas (keabsahan) yang harus dibandingkan dengan sumber data primer lainnya maupun data sekunder. Data primer yang diambil meliputi identitas responden, kepemilikan lahan, jenis tanaman, jumlah tanaman per ha, cara pengelolaan lahan, harga jual produk (kayu), harga bibit, tenaga kerja, biaya transport, biaya angkut, biaya dokumen dan lain-lain. Sedangkan data sekunder yang diambil dari monografi desa, luas hutan rakyat dan lain-lain yang mendukung kajian.

2. Data sekunder

Selain data primer yang diperoleh di lapangan melalui wawancara mendalam maupun FGD, juga dilakukan penelusuran pustaka yang memiliki relevansi dengan kajian ini sebagai data sekunder. Data sekunder diperoleh berupa data monografi desa kajian, data demografi/kecamatan dalam angka dan kabupaten dalam angka dari BPS, data base kawasan hutan dan lahan (hutan hak/hutan rakyat) dari Dishut Kab. Bulukumba, serta hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh pihak lain yang berkaitan baik mengenai tabel volume pohon maupun hasil penelitian lainnya.

Tabel 1. Responden survei dan luas areal kelola kelompok tani penghijauan
Table 1. Responden survey and area manage by forest farmer group

Desa (*Village*)	Kelompok Tani Penghijauan (*Forest Farmer Group*)	Responden survey (*Responden survey*)			Peserta FGD (*participant FDG*)
		Jumlah responden *(total responden)*	Luas areal *sampling* (Ha) a) (*sampling area*)	Luas wilayah kajian (Ha) a) (*areal of reseacrh*)	
Karassing	Suka Maju	31	68	199,47	40
	Suka Makmur	31	49	292,75	40
Balong	Pembagunan Bersama	31	34,13	54,75	40

Keterangan:
a) Luas areal kelola dijadikan dasar untuk perhitungan dalam analisa finansial
b) FGD (*Focus Group Discussion*)

D. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisa dengan Analisa Biaya dan Manfaat (*Cost Benefit Analysis*) secara finansial. Analisa finansial difokuskan untuk menganalisa biaya dan manfaat yang mempunyai nilai pasar. Pendekatan harga bayangan *(shadow price)* akan dilakukan untuk memperoleh nilai ekonomi terhadap biaya dan manfaat yang tidak mempunyai nilai ekonomi. Teknik analisa data dilaksanakan dengan tahapan rekapitulasi data, entri data dan tabulasi. Analisis finansial adalah salah satu cara untuk mengetahui kelayakan suatu kegiatan investasi yang berhubungan dengan pengusahaan hutan, dalam hal ini adalah pengelolaan hutan rakyat kemitraan di Kabupaten Bulukmba. Fokus dari analisa finansial adalah menghitung manfaat bersih dengan menghitung semua biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari pengelolaan suatu luasan areal tertentu yang dikelola secara kemitraan dalam jangka waktu kemitraan tertentu. Nilai manfaat bersih ini merupakan nilai sekarang dari manfaat yang akan diperoleh dimasa yang akan datang pada saat panen atau pada saat program kemitraan telah memberikan manfaat tertentu. Mengubah nilai manfaat masa datang ke masa sekarang memerlukan *discount rate* atau tingkat diskonto tertentu yang biasanya berdasarkan tingkat bunga bank yang berlaku.

Kriteria-kriteria ukuran kelayakan proyek dalam analisis finansial (Perkins, 1994) yang digunakan antara lain :

1. Net Present value (NPV)

NPV yaitu nilai manfaat masa akan datang yang dinilai dengan harga-harga pada masa kini, yang didapat dengan mendiskonto semua biaya dan pendapatan pada suku bunga diskonto dan kemudian hasil diskonto pendapatan dikurangi hasil diskonto biaya. Suatu kegiatan dikatakan layak jika NPV Positif.

$$NPV = \sum_{t=1}^{n} \frac{Bt-Ct}{(1+i)^t}$$

Keterangan : B_t : Benefit (Manfaat atau penerimaan) pada tahun ke-t
C_t : Cost (Biaya) pada tahun ke-t
i : interest (suku bunga) yang merupakan faktor diskonto
t : satuan waktu dalan tahun
n : tahun ke n

2. Benefit Cost Ratio (BCR)

BCR atau rasio penerimaan dengan biaya, yang didapat dengan membagi jumlah hasil diskonto pendapatan dengan jumlah hasil diskonto biaya. Kegiatan dikatakan layak jika BCR lebih besar dari satu.

$$BCR = \frac{\sum_{t=0}^{n} \frac{Bt}{(1+i)^t}}{\sum_{t=0}^{n} \frac{Ct}{(1+i)^t}}$$

Keterangan:
B_t : Benefit (Manfaat atau penerimaan) pada tahun ke-t
C_t : Cost (Biaya) pada tahun ke-t
i : interest (suku bunga) yang merupakan faktor diskonto
t : satuan waktu dalam tahun
n : tahun ke n

3. Internal Rate of Return (IRR)

IRR adalah tingkat bunga dimana bila digunakan untuk mendiskonto seluruh selisih kas masuk pada tahun-tahun operasi proyek akan menghasilkan jumlah kas yang sama dengan jumlah investasi proyek. Pada dasarnya IRR menggambarkan presentase laba senyatanya yang dapat dihasilkan oleh proyek (Husnan dan Suwarsono, 1994). Nilai IRR ditentukan dengan mencari nilai faktor diskonto (*discount rate*) yang membuat nilai NPV sama dengan nol. Untuk menentukan berapa tepatnya tingkat bunga tersebut adalah dengan menggunakan metoda interpolasi, yakni dengan menyisipkan tingkat bunga diantara bunga yang menghasilkan NPV positif dan tingkat bunga yang menghasilkan NPV negatif. Suku bunga diskonto yang menyebabkan jumlah hasil diskonto pendapatan sama dengan jumlah hasil diskonto biaya, atau suku bunga yang membuat NPV sebesar nol. Suatu proyek dikatakan layak bila IRR lebih besar dari suku bunga diskonto.

4. Asumsi-*asumsi* yang digunakan

Beberapa asumsi untuk melakukan analisa kelayakan finansial dalam penelitian ini, antara lain:

a) Unit analisa untuk pengelolaan model kemitraan adalah Kelompok Tani Penghijauan (KTP) di dua desa dan dua kecamatan (Desa Karasing, Kec.Herlang dan Desa Balong, Kec. Ujungloe) yaitu total luasan areal kelola responden sample dan total luas wilayah kerja KTP.
b) Jangka waktu analisa adalah sejak masyarakat mulai terlibat dalam kemitraan, (Desa Karassing mulai tahun 2005 dan Desa Balong mulai tahun 2004), selama 25 tahun yaitu panen terakhir tanaman kayu yang bibitnya dari PT. PAL.
c) Komoditi yang dimitrakan adalah jenis kayu sengon, mahoni dan gmelina dari PT. PAL, sedangkan pemberian dari perusahaan lainnya belum bisa dihitung karena keterbatasan dokumentasi data dan distribusinya.

d) Bunga diskonto didekati dengan suku bunga komesial sebesar 13%.
e) Investasi pemerintah dari Dinas Kehutanan Kabupaten Bulukumba berupa Anggaran Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Kabupaten Bulukumba tahun 2005 pada dua kecamatan yaitu Kecamatan Herlang dan Kecamatan Ujunggloe.
f) Biaya yang dialokasikan pada lokasi kajian ditetapkan berdasarkan pendekatan luas KTP dibagi dengan luas kecamatan dikalikan biaya-biaya pengembangan hutan rakyat.
g) Input dari masyarakat yang diperhitungkan dalam analisis terutama biaya tenaga kerja, bahan dan alat.
h) Analisis ekonomi tidak dilakukan karena tegakan masih berumur 3-4 tahun sehingga dianggap belum mempengaruhi iklim makro di sekitar desa kajian.
i) Pengeluaran untuk investasi dan harga-harga faktor-faktor produksi didasarkan pada harga konstan.
j) Harga jual dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dianggap tetap dan penerimaan atas penjualan pada tahun yang bersangkutan diasumsikan dapat diterima pada tahun yang sama.
k) Satuan yang digunakan adalah rupiah per hektar per tahun (Rp/ha/tahun).
l) Pendapatan tanaman pokok kehutanan dihitung sejak terjadinya penebangan sampai tebang akhir.
m) Satu Hari Orang Kerja (HOK) dinilai dengan upah yang berlaku dilokasi studi.
n) Umur kelayakan proyek dihitung sampai umur tebang ideal tanaman kehutanan

5. Verifikasi

a. Pleno di tingkat desa

Informasi dari lapangan dibahas bersama oleh warga desa dalam pertemuan (lokakarya) tingkat desa. Selain sebagai ajang kompilasi dan triangulasi informasi, pleno juga merupakan upaya membangun kesepakatan antar warga desa, baik tentang persoalan-persoalan yang dapat diselesaikan secara intern oleh desa, maupun tentang persoalan yang perlu diangkat ketingkat yang lebih tinggi. Diharapkan pemecahan masalah lokal bisa dilakukan secara mandiri oleh warga desa, dan warga desa dapat menyepakati tim perwakilan desanya untuk menghadiri pleno tingkat kabupaten.

Pleno ini merupakan wahana bagi untuk meneliti ulang hasil temuan sementara tim kajian. Pleno Desa dilaksananakan dalam dua tahapan diskusi kelompok dan diskusi pleno. Tim Kajian melakukan presentasi hasil sementara kajian kemudian klarifikasi hasil temuan dan diskusi dengan tiga topik sesuai keluaran *(output)* dari tahapan ini. Tiga topik tersebut, *Pertama*, menemukenali persoalan yang dihadapi oleh kelompok masyarakat baik yang terkait dengan pengelolaan hutan rakyat khusunya peredaran hasil hutan rakyat (pemunugutan hasil hutan rakyat). *Kedua*, merumuskan apa itu kemitraan versi masyarakat dalam konteks pengelolaan hutan rakyat selama ini di Kabupaten Bulukumba. *Ketiga*, meneliti ulang asumsi yang digunakan dalam melakukan analisis finansial dan hasil sementara analisis tersebut.

b. Pleno di tingkat kabupaten

Hasil kajian yang telah diverifikasi di pleno desa, kemudian disampaikan oleh masing-masing perwakilan desa di pleno kabupaten. Pleno kabupaten sekaligus menjadi ruang negosiasi antara masyarakat dengan pemerintah kabupaten terkait dengan harapan masyarakat yang tertuang dalam hasil kajian. Peserta pleno kabupaten yakni lintas instansi

teknis pemerintah, LSM maupun perwakilan masyarakat lokasi model lain di luar lokasi kajian. Tahapan ini dapat menjadi media untuk mempengaruhi cara pandang pemerintah dan pihak lain. Selain itu tahapan ini menjadi pentingn untuk mendorong adanya kebijakan yang menumbuhkan kemitraan yang adil antara masyarakat dengan pihak lain dalam pengelolaan hutan rakyat di Bulukumba.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi kemitraan pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Bulukumba

Kemitraan pengelolaan dan pemasaran hasil hutan rakyat di Kabupaten Bulukumba dilakukan antara masyarakat, sebagai pemilik lahan, dengan PT. PAL atau perusahaan kayu (*sawmill*) lain, sebagai pihak perusahaan, yang melakukan pembelian kayu rakyat melalui mitra antara/tengkulak/peluncur. Mitra antara (MA) yang melakukan pengumpulan kayu rakyat merupakan perpanjangan tangan dari PT. PAL dan perusahaan kayu lain karena ikatan permodalan yang telah diberikan kepada MA dan tidak memiliki ikatan resmi untuk menjual kayu tersebut ke PT. PAL maupun Perusahaan Kayu lainnya. Apabila terdapat selisih harga pembelian kayu, maka mitra antara berhak untuk melakukan transaksi dengan perusahaan lain di luar PT. PAL. Hal ini terjadi karena adanya beberapa MA yang ada di Bulukumba, antara lain; MA dari PT. PAL, MA antara perusahaan non PT. PAL dan MA mandiri.

Selama ini petani sebagai penerima harga (*price taker*) untuk hasil hutan kayu dengan sistim pembelian berdasar hamparan lahan maupun per pohon/batang untuk jenis jati, sengon, jati putih, mahoni dan bitti. Masyarakat menerima harga bersih tanpa dikurangi oleh biaya-biaya antara lain; biaya transportasi, biaya panen, biaya pengurusan dokumen dan biaya pendukung lainnya yang ditanggung oleh MA. Sedangkan MA menjual produk (kayu/log) dalam satuan kubik (m^3) kepada PT. PAL maupun perusahan kayu lainnya berdasarkan standar kualitas jenis kayunya. Kondisi ini sangat menguntungkan pihak MA karena mendapatkan *profit margin* yang cukup besar dari penjualan dengan sistim ini. Hal ini dianggap wajar karena MA menanggung semua biaya dan melakukan pengurusan dokumen walaupun sebagian modalnya berasal dari PT.PAL atau perusahaan kayu lainnya. Kondisi ini menjadi perhatian dalam kajian ini. Secara ringkas pola kemitraan yang ada di Kab. Bulukumba bisa dilihat pada Gambar 1.

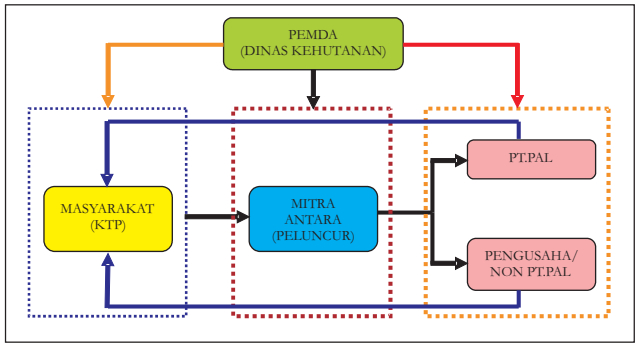

Gambar 1. Model Kemitraan Pengelolaan Hutan Rakyat di Kabupaten Bulukumba
Figure 1. Model of Private Forest Management Partnership in Bulukumba Regency

Tiga pelaku utama dalam kemitraan, yaitu Dinas Kehutanan Kab. Bulukumba sebagai perwakilan pemerintahan, masyarakat/KTP dan PT. PAL atau perusahaan kayu lainnya. Peran masing-masing pelaku kemitraan diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

1) Dinas Kehutanan

Dinas Kehutanan (Dishut) Kab. Bulukumba memfasilitasi kemitraan antara masyarakat dan PT. PAL di desa Balong melalui pemberian bibit tanaman kehutanan yang dituangkan dalam berita acara penerimaan dan penanaman bibit pada lahan masyarakat dalam bentuk kontrak kerjasama sederhana. Peran dinas kehutanan dalam kemitraan ini adalah mengakomodir kepentingan masyarakat dan pihak lain, melakukan panduan dalam pelaksanaan pengelolaan hutan lestari dan legalisasi IPKHR (Ijin Pemungutan Kayu Hutan Rakyat).

Hasil hutan kayu yang diperdagangkan dalam kemitraan ini adalah sengon (*Paraserianthes falcataria*), Gmelina (*Gmelina arborea*), karet (*Hevea braziliensis*) dan jenis kayu lainnya. Dinas Kehutanan menfasilitasi pemberian/pelayanan ijin dan dokumen pendukung (IPKHR, SKSHH-SKSB, tim cruising) untuk memperlancar proses pemungutan hasi hutan rakyat oleh pengusaha, sedangkan peran Dishut untuk masyarakat adalah mediasi dan fasilitasi dalam sosialisasi kebijakan/program, advis teknis kehutanan dan pengembangan kemitraan dengan pihak lainnya.

2) Masyarakat

Masyarakat sebagai pemilik lahan menerima bantuan bibit sengon (*Paraserianthes falcataria*) dan gmelina (*Gmelina arborea*) dan bibit lainnya dari PT. PAL maupun dari perusahaan lainnya mulai tahun 2004-sekarang, dengan syarat masyarakat harus memelihara tegakan tersebut dan tidak diperkenankan memindah-tangankan ke pihak lain. Selama ini pemberian bibit melalui KTP dan mekanisme pemberiannya dilakukan untuk anggotanya masing-masing walaupun dianggap pemberian bibit ini belum merata karena belum semua anggota menerimanya.

3) Mitra Antara (MA)

Mitra antara (MA) sebagai pihak yang mengumpulkan kayu dari masyarakat dan menjualnya ke PT. PAL atau perusahaan lainnya. Ada beberapa jenis MA yang ada di Kab. Bulukumba antara lain; MA PT. PAL, MA non-PT. PAL dan MA Mandiri. Perbedaan antar MA didasarkan atas cara memeproleh modal yang diberikan oleh PT. PAL atau perusahaan lainnya. MA PT. PAL berkewajiban menjual kayu kepada PT. PAL karena modal kerjanya berasal dari perusahaan tersebut. MA non-PT. PAL berkewajiban menjual kayu kepada perusahaan/CV yang memberikan modal kerja. Sedangkan MA mandiri bebas untuk menjual kayu kepada pihak yang dianggap memberikan keuntungan lebih besar. Pada kenyataannya MA tidak terikat secara legal formal dengan perusahaan sehingga ada beberapa mitra yang menjual kayu kepada perusahaan yang memberikan keuntungan lebih besar. Nama lokal dari MA adalah **"peluncur"** atau lebih dikenal dengan nama tengkulak/pengumpul. Kondisi saat ini MA mengumpulkan dan membeli kayu rakyat dalam bentuk hamparan (jenis jati) dan dalam bentuk per pohon atau per batang (jenis sengon, jati putih, mahoni) dengan menanggung semua biaya panen, transportasi serta pengurusan dokumen utama dan dokumen pendukung lainnya.

4) PT. Palopo Alam Lestari (PT.PAL)

PT. PAL adalah perusahaan kayu yang terlibat dalam embrio kemitraan, dimotivasi oleh dinas kehutanan Kab. Bulukumba untuk mengolah kayu sengon dan gmelina hasil hutan rakyat. PT. PAL belum membuat kesepakatan kerjasama tertulis dengan masyarakat (KTP) untuk membeli kayu tersebut di kemudian hari setelah masak panen berdasarkan harga pasar yang berlaku sehingga masyarakat bebas menjual pada perusahaan lain yang menawarkan harga lebih baik. Sampai saat ini PT. PAL hanya memberi bibit sengon dan gmelina secara gratis kepada KTP.

Tabel 2. Lokasi pembagian bibit PT. PAL
Table 2. Location of seed distribution in PT.PAL

Kelompok Tani Penghijauan (KTP) (*Forest Farmers Group*)	Tahun (*Years*)	Sengon *(Paraserianthes Falcataria)*	Jati putih *(Gmelina orborea)*	Total
KTP Suka Maju (292,75 Ha)	2005	3,220	-	3,220
	2006	122	81	203
	Total	3,342	81	3,423
KTP Suka Makmur (199,47 Ha)	2006	178	119	297
	Total	178	119	297
KTP Pembangunan Bersama (54.75 Ha)	2005	18,930	-	18,930
	2007	1,469	14,811	16,280
	Total	20,399	14,811	35,210

Sumber : PT. PAL, 2007
Source : PT.PAL, 2007

PT. PAL membeli kayu rakyat dalam ukuran kubikasi melalui MA sebagai pemasok ke PT. PAL. PT. PAL hanya menerima kayu lunak seperti sengon, gmelina, dan randu serta tidak menerima kayu keras seperti jati, bitti dan mahoni dengan panjang, diameter dan standar mutu yang telah ditentukan. Harga untuk kayu rimba tersebut dianggap seragam yaitu diamater > 20 cm harganya Rp.250.000/m^3 dengan asumsi dokumen lengkap dan Rp. 220.000 dengan asumsi tanpa dokumen sedangkan untuk diameter < 20 cm harganya Rp.150.000,-./m^3.PT. PAL membuat produk veneer yang akan dijual kepada perusahaan induknya yaitu PT. PAMPLY di Kabupaten Palopo.

5) Perusahaan Kayu/ *Sawmill* (Non PT. PAL)

Peusahaan non-PT.PAL menerima kayu yang berasal dari mitranya dengan sistim pembelian kubikasi untuk semua jenis kayu yang ada di Kab. Bulukumba baik jati, bitti,

sengon, karet, mahoni, jati putih dan lain-lain. Perusahaan kayu ini menjual kayu dalam bentuk bantalan (istilah pengganti balok di Bulukumba) ke Kabupeten lain, Makassar maupun antar pulau terutama Jawa. Sampai saat ini pasokan rimba campuran di Kabupaten Bulukumba berasal dari hutan rakyat dan dari luar Kabupaten. Perkiraan jumlah kayu yang diproduksi dari hutan rakyat dengan luas 21.843 ha adalah sekitar 22.942 m^3 dari luas 267,6 ha (sesuai data IPKHR).

Dari kondisi tersebut perdagangan kayu rimba campuran di Kabupaten Bulukumba mengalami masalah yaitu pasokan kayu lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan industri yang ada. Industri perkayuan yang ada memberikan kesempatan kerja kurang lebih kepada 20.000 KK di Kabuapten Bulukumba. Di sisi lain, usaha hutan rakyat yang dilaksanakan oleh petani belum tentu menguntungkan karena rantai penjualan yang panjang (Gambar 2). Hal ini salah satu penyebabnya adalah kurang jelasnya besar biaya yang harus ditanggung oleh petani, MA atau pengusaha sawmill dan PT. PAL. Di samping itu nilai tambah dari produk yang dijual

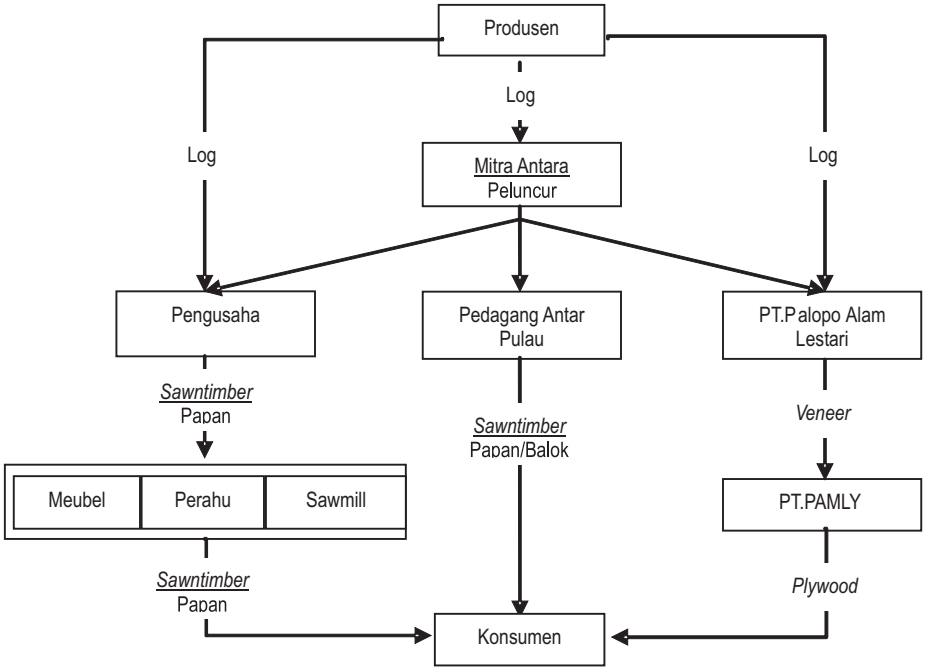

Gambar 2. Tata Niaga Kayu di Kabupaten Bulukumba
(*Figure 2. Trading system of timber in Bulukuma Regency)*

Permintaan kayu rimba campuran di Bulukumba setiap tahunnya meningkat (lihat Gambar 3), tetapi kualitas yang dibutuhkan belum terpenuhi dari kayu yang ditawarkan. Sementara itu harga log yang ditawarkan oleh PT. PAL tidak bersaing dengan harga yang ditawarkan industri lain. Standar harga kayu rimba dan kayu karet yang dikeluarkan oleh PT. PAL adalah diamater > 20 cm sebesar Rp. 250.000/m^3 (dokumen lengkap) dan Rp. 220.000/ m^3 (dokumen PT.PAL yang urus) dan diameter < 20 cm: Rp. 150.000/ m^3, sedangkan harga

log kayu rimba untuk pengusaha sawmil lainnya berkisar Rp. 300.000-450.000/m^3. Jadi ada selisih harga yang cukup besar yang ditawarkan oleh pengusaha sawmill lainnya yang bisa berakibat pada pindahnya penjualan log petani ke tempat lain yang sudah bermitra dengan PT. PAL. Di sisi lain permintaan dari luar Bulukumba lebih menarik dengan harga yang lebih tinggi, di samping belum adanya aturan main untuk mengatur kayu masuk dan keluar Bulukumba untuk menjamin pemenuhan permintaan kayu domestik di Kabupaten Bulukumba.

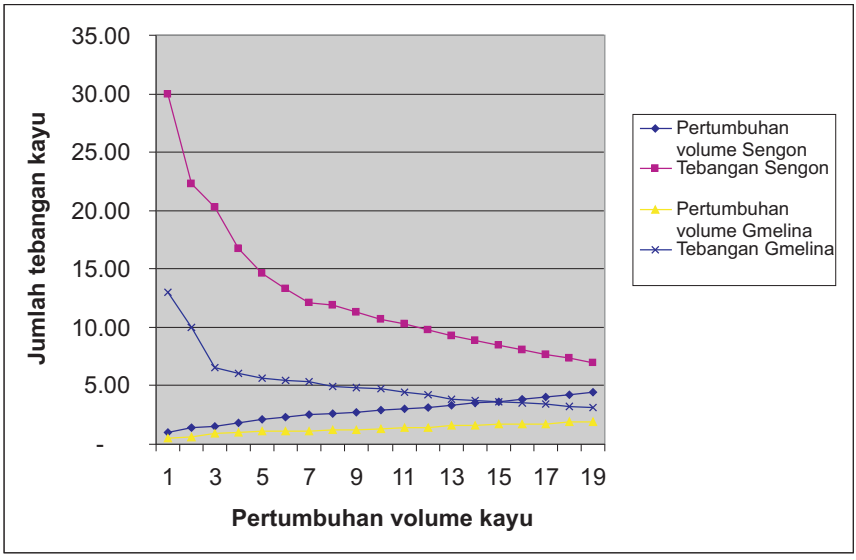

Gambar 3. Perbandingan volume kayu dengan jumlah tebangan di Kabupaten Bulukumba
Figure 3. Comparison of timber volume with total harvesting in Bulukumba Regency

Produksi kayu dan non kayu tahun 2003-2004 di Kab. Bulukumba, cenderung mengalami kenaikan seperti pada Gambar 4, mengindikasikan bahwa hutan yang ada di Kab. Bulukumba diekploitasi setiap tahunnya dengan kenaikan produksi sebesar 12% untuk kayu rimba, 39% untuk kayu jati dan 87% untuk kayu bakar serta 77,14% untuk non kayu. Sementara untuk produksi kayu bulat dan olahan pada tahun 2004, hampir 54% merupakan komoditi kayu bulat dengan besarnya produksi sekitar 16.000 m^3 (Dinas Kehutanan Kab.Bulukumba, 2005).

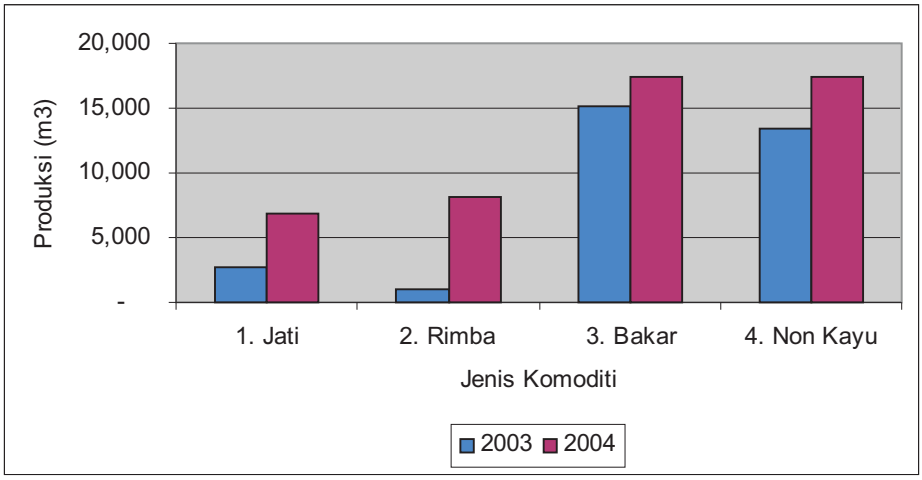

Gambar 4. Produksi Kayu dan Non Kayu tahun 2003-3004 di Kab. Bulukumba
Figure 4. Timber and Non Tomber production 2003-2004th in Bulukumba Regency

Produksi kayu olahan di Kab. Bulukumba mengalami kenaikan yang cukup fantastis pada tahun 2004, yaitu hampir 5 kali lipat. Kondisi tersebut disebabkan pada tahun 2003-2004 perkembangan industri sektor kehutanan mengalami peningkatan dengan indikator semakin banyaknya industri sawmill kayu jati dan kayu rimba yang berijin maupun tidak berijin dengan jumlah sekitar 40 industri kayu. Sedangkan pada Gambar 7, terlihat produksi dari IPKHR dibandingkan dengan kayu yang masuk dari luar Kabupaten Bulukumba sangat menyolok, dimana kecenderungannya untuk IPKHR semakin naik hanya mengalami penurunan pada tahun 2006. Sedangkan untuk kayu yang masuk dari luar Kab. Bulukumba mengalami penurunan (Dinas Kehutanan Kab.Bulukumba, 2005).

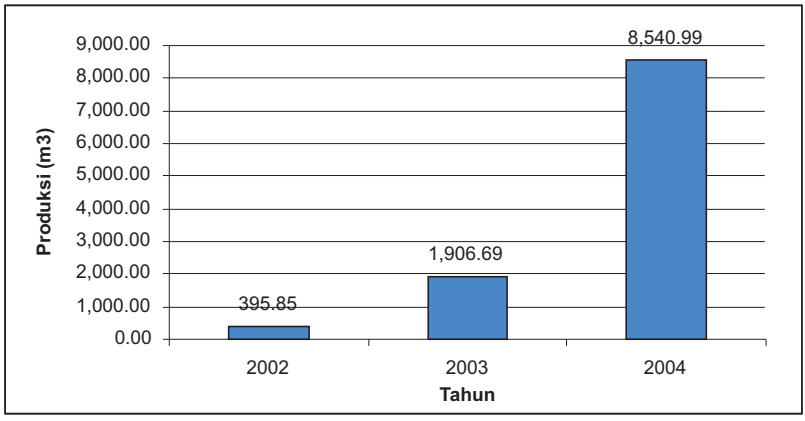

Gambar 5. Produksi kayu olahan di Kab. Bulukumba 2002-2004
Figure 5. Sawntimber production in Bulukumba Regency

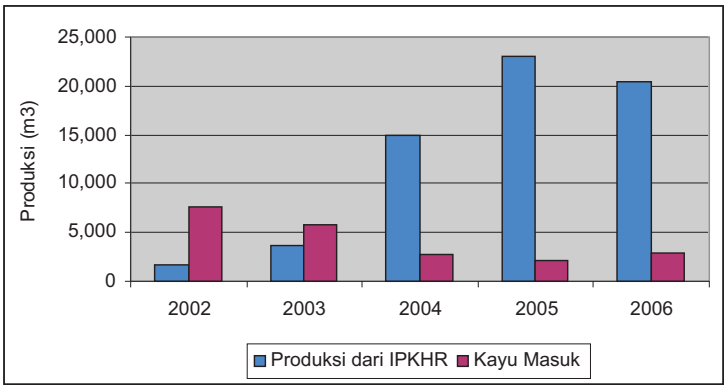

Gambar 6. Perbandingan produksi dari IPKHR dengan kayu yang masuk ke Kab. Bulukumba (2002-2006)

Figure 6. Comparison of pProduction for IPKHR with all timber entery Bulukumba Regency 2002-2006

Pendapatan Dishut Kab. Bulukumba dari sektor kehutanan, setiap tahunnya mengami kenaikan yang cukup besar yaitu sekitar 2 kali lipat per tahunnya khususnya dari pengelolaan hutan rakyat seperti terlihat pada Gambar 7. Dari kondisi tersebut terliha bahwa hutan rakyat merupakan andalan untuk meningkatkan pendapatan dari sektor kehutanan. Apabila dibandingkan dengan pendapatan dari sektor lain seperti pendapatan dari kawasan hutan negara (hutan produksi, HKm) hampir mencapai perbandingan 1 : 7. Pendapatan ini sebagaian besar berasal dari retribusi-retribusi yang dikenakan pada hasil hutan rakyat pada kayu jati dan kayu rimba campuran. Hal ini apabila tidak diantisipasi lebih lanjut oleh Dishut maka hutan rakyat yang ada di Kab. Bulukmba akan mengalami degradasi setiap tahunnya apabila tidak diikuti dengan permudaan agar hutan rakyat di Kab.Bulukumba lestari (Dinas Kehutanan Kab.Bulukumba, 2005).

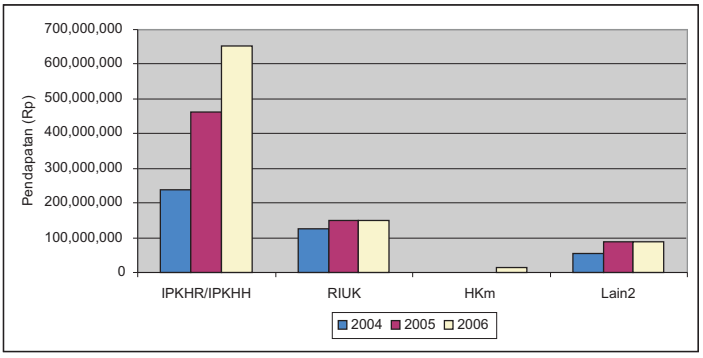

Gambar 7. Pendapatan Dinas Kehutanan Kab. Bulukumba dari Sektor Kehutanan (2004-2006)

Figure 7. Revenenue from forestry sector of Forestry Regional Office at Bulukumba Regency

B. Analisa Finansial

Analisis finansial bertujuan mengetahui kelayakan investasi pengusahaan hutan oleh masyarakat sebagai pemilik lahan selama daur pohon kehutanan (misalnya 25 tahun). Arus biaya meliputi biaya perencanaan, pengadaan bibit, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan baik untuk tanaman kehutanan (kayu) maupun tanaman pertanian. Arus penerimaa meliputi hasil yang diperoleh petani dalam pengelolaan hutan berupa hasil tanaman kehutanan (kayu) yang dimitrakan dengan pengusaha (PT. PAL).

Dasar perhitungan analisis financial kemitraan pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Bulukumba sebagai berikut;

1. Perhitungan berdasarkan luasan areal kelola KTP
2. Tiga (3) KTP lokasi studi
   - Pembangunan Bersama (Balong): 54,75 Ha
   - Suka Makmur (Karassing): 199,47 Ha
   - Suka Maju (Karassing): 292.75 Ha
3. Perhitungan dimulai pada tahun dimana masyarakat menerima bibit dari PT. PAL
4. Dihitung selama 25 tahun, atau sampai panen kayu berdasarkan habisnya bibit yang dialokasikan oleh PT. PAL
5. Perhitungan biaya dan penerimaan dihitung untuk seluruh pelaku (petani, MA/pengusaha, PAL, Dishut)
6. Tingkat bunga komersial yang digunakan adalah 13%
7. Ada keterbatasan data & informasi sehingga untuk beberapa komponen biaya dan penerimaan dilakukan penduga

Tabel 3. Analisis Finansial Kelompok Tani Penghijauan (KTP)
Table 3. Financial analysis of farmers group

Jenis kayu (*Timber species*)	Penerimaan kayu (Rp juta) *(Income from timber)*		
	Pembangunan Bersama (25 thn)	Suka Makmur (7 tahun)	Suka Maju (9 tahun)
Sengon *(Paraserianthes falcataria)*	1.158.532.572	10.622.324	198.753.076
Jati Putih *(Gmelina orborea)*	201.866.971	2.968.711	3.156.358
Nilai tegakan Gmelina yang belum dipanen (*Standing stock*)	64.878.159	-	-
NPV	12.622.021	- 970.053.068	- 1.070.631.865
BCR	1.01	0,0048	0,16
IRR	13%	-	-

Tabel 3 menunjukkan bahwa pengelolaan hutan rakyat kemitraan di KTP Pembangunan Bersama Desa Balong, Kecamatan Ujungloe layak secara finansial, hal ini ditandai dengan nilai NPV sebesar Rp. 12.622.02, artinya kemitraan pengelolaan hutan rakyat layak secara finansial walaupun masih dalam taraf minimal dan sebanding dengan suku bunga bank yang berlaku pada saat itu. Apabila kita gunakan IRR maka nilainya adalah 0,13 artinya dan suku bunga diskonto yang menyebabkan jumlah hasil diskonto pendapatan sama dengan jumlah hasil diskonto biaya, atau suku bunga yang mempuat NPV sebesar nol. Suatu proyek dikatakan layak bila IRR lebih besar dari suku bunga diskonto, sehingga apabila kita melihat ini pengusahaan hutan rakyatnya belum menguntungkan. Sedangkan apababila kita menggunakan BCR akan didapatkan nilai sebesar 1,01 artinya jika sebuah proyek memiliki nilai BCR lebih dari satu maka benefit atau keuntungan yang diperoleh lebih besar dari biaya yang dikeluarkan sehingga hutan rakyat kemitraan di KTP Pembangunan Bersama layak untuk diusahakan.

Untuk KTP Suka Makmur di Desa Karassing Kecamatan Herlang bahwa pengelolaan hutan kemitraan belum menguntungkan secara finansial, hal ini ditandai dengan nilai NPV sebesar Rp. - 970.053.068 dan BCR sebesar 0.0048 artinya bahwa kemitraan pengelolaan hutan rakyat belum layak secara financial karena biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada keuntungan yang didapat. Sedangkan untuk KTP Suka Maju di Desa Karassing Kecamatan Herlang, pengelolaan hutan kemitraan belum menguntungkan secara finansial, hal ini ditandai dengan nilai NPV sebesar Rp. - 1.070.631.865 dan BCR sebesar 0.16 artinya bahwa kemitraan pengelolaan hutan rakyat belum layak secara finansial karena biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada keuntungan yang didapat.

Tabel 4. Jumlah dan presentase biaya berdasarkan stakeholder yang terlibat kemitraan
Table 4. Total and cost percentage based on stakeholders commmunity partnership

Jumlah biaya berdasarkan pelaku	KTP Pembangunan Bersama		KTP Suka Makmur		KTP Suka Maju	
	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)
a. Biaya finansial pemerintah	1.517.152	0.11	6.624.581	0.3	5.241.219	0,4
b.Biaya finansial masyarakat	344.703.478	24	1.963.820.045	99.0	1.088.337.609	85,4
c. Biaya finansial Mitra Antara (MA)	1.050.779.679	74	14.030.444	0.7	170.568.149	13,4
d. Biaya finansial PAL	15.655.372	1	175.635	0.01	9.634.138	0,8
Total biaya finansial	**1.412.655.681**	**100**	1.984.650.705	**100**	1.273.781.114	**100**

Untuk memperjelas proporsi biaya dan komponennya oleh mitra antara (MA) pada KTP Pembangunan Bersama bisa dilihat pada Tabel 4. Biaya yang paling besar dikeluarkan oleh MA adalah biaya angkut sebesar 59%, kemudian menyusul biaya administrasi 29% dan biaya tebang sebesar 12%. Kondisi ini menyebabkan besarnya biaya finansial MA yang harus dikeluarkan dalam penatausahaan hasil hutan rakyat di Kabupaten Bulukumba sebesar 74%.

Tabel 5. Proporsi biaya mitra antara (MA) berdasarkan komponennya pada KTP Pembangunan Bersama, Desa Balong, Kecamatan Ujungloe

Table 5. Cost proportion of middleman (MA) based on component for farmer forest grous Pembangunan Bersama, Balong Village, Ujungloe District

Komponen Biaya Mitra Antara	Rp	Persentase (%)	Persentase terhadap total komponen (%)
1. Biaya administrasi			
a. Setoran ke Desa	25.969.650		8,5
b. Cruising	19.477.237		6,4
c. Retribusi	64.924.125		21,3
d. SKSHH	194.772.374		63,8
Jumlah biaya administrasi	305.143.385	29	100
2. Biaya tebang			
a. Sewa chainsaw	17.635.252		14,3
b. Tenaga kerja	105.811.514		85,7
Jumlah biaya tebang	123.446.767	12	100
3. Biaya angkut			
a. Tenaga kerja muat	64.924.125		10,4
b. Tenaga kerja angkut-bongkar	232.644.780		37,4
c. Sewa truk	324.620.623		52,2
Jumlah biaya angkut	745.636.294	59	100
Total biaya MA	1.050.779.679	100	

Proporsi biaya yang harus dikeluarkan oleh stakeholder di Desa Karasing, Kecamatan Herlang agak berbeda dengan di Desa Balong, Kecamatan Ujungloe seperti terlihat pada Tabel 6. Proporsi biaya terbesar yang dikeluarkan oleh masyarakat (petani) yaitu sekitar 99%, kemudian secara berurutan pemerintah sebesar 0,33%, mitra antara 0,17%, dan PT. PAL sebesar 0,01%. Kondisi ini disebabkan tidak sesuainya jumlah bibit yang dibagikan dengan luas areal kerja pada masing-masing KTP, di samping berbagai macam biaya administrasi, pemanenan dan angkut kayu yang cukup besar dalam penatausahan hasil hutan rakyat.

Tabel 6. Proporsi biaya berdasarkan komponennya pada KTP Suka Makmur, Desa Karassing, Kecamatan Herlang

Table 6. Cost proportion of middleman (MA) based on component for farmer forest groups Suka Makmur, Balong Village, Herlang District

Komponen Biaya Mitra Antara	Rp	Persentase (%)	Persentase terhadap total komponen (%)
1. Pemerintah			
a. Sosialisasi kebijakan	230.675	3	
b. Bantuan saprodi	2,167.449	33	
c. Administrasi	300.206	5	
d. Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan	322.174	5	
e. Penyuluhan	1,250.859	19	
f. Desiminasi	2,353.218	36	
Jumlah	6,624.581	100	0,33
2. Masyarakat			
a. Peralatan	25.234.241	1	
b. Tenaga kerja	1.911.250.157	97	
c. PBB	27.283.014	1	
d. Pengambilan bibit	52.633	0	
Jumlah	1,963.820.045	100	99
3. Mitra antara			
a. Adminstrasi	4.204.873	30	
b. Penebangan Kayu	1.251.806	9	
c. Angkut Kayu	8.573.765	61	
Jumlah	14.030.444	100	0,17
4. PT. PAL			
a. Bibit	131.583	75	
b. Administrasi	44.052	25	
Jumlah	175.635	100	0,01
Total biaya Finansial	**1,984.650.705**		

Proporsi biaya yang harus dikeluarkan oleh stakeholder hampir sama dengan di KTP Suka Makmur bedanya hanya pada prosentase saja yaitu masyarakat (petani) sekitar 85%, kemudian secara berurutan mitra antara 13%, PT. PAL sebesar 1% dan pemerintah sebesar 0,41%. Kondisi ini relatif hampir sama dengan apa yang terjadi di KTP Suka Makmur di Desa Kecamatan yang sama.

Tabel 7. Proporsi biaya berdasarkan komponennya pada KTP Suka Maju, Desa Karassing, Kecamatan Herlang

Table 7. Cost proportion of middleman (MA) based on component for farmer forest groups Suka Maju, Balong Village, Herlang District

Komponen Biaya Mitra Antara	Rp	Persentase (%)	Persentase terhadap total komponen (%)
1. Pemerintah			
a. Sosialisasi kebijakan	157.174	3	
b. Bantuan saprodi	1.476.827	28	
c. Administras	231.297	4	
d. Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan	1.156.484	22	
e. Penyuluhan	963.737	18	
f. Desiminasi	1.255.700	24	
Jumlah	5.241.219	100	0,41
2. Masyarakat			
a. Peralatan	19.319.852	2	
b. Tenaga kerja	1.051.475.581	97	
c. PBB	13.924.808	1	
d. Pengambilan bibit	601.648	0	
Jumlah	1.088.337.609	100	85
3. Mitra antara			
a. Adminstrasi	50.006.868	29	
b. Penebangan Kayu	18.596.922	11	
c. Angkut Kayu	101.964.359	60	
Jumlah	171.568.149	100	13
4. PT. PAL			
a. Bibit	9.554.053	99	
b. Administrasi	80.085	1	
Jumlah	9.634.138	100	1
Total biaya Finansial	**1.273.781.114**		

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil perhitungan analisi finansial yang dilakukan pada tiga KTP di Kabupaten Bulukumba, maka ada beberapa pelajaran yang bisa diambil antara lain;

1. Pengelolaan hutan rakyat kemitraan di Kabupaten Bulukumba secara umum belum menguntungkan secara financial.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi usaha hutan rakyat kemitraan antara lain; jumlah bibit yang diterima tidak sesuai dengan luasan KTP yang diusahakan, sehingga usaha hutan rakyat menjadi belum menguntungkan; tidak adanya standar harga berdasarkan kualitas dan jenis kayu, menyebabkan petani dirugikan (misalnya pembelian dengan sistem tebas hamparan) dan biaya administrasi (SKSHH, retribusi, cruising dan setoran ke desa) yang cukup tinggi.
3. Apabila usaha hutan rakyat belum layak, petani mempunyai beban untuk menanggung biaya yang cukup tinggi, terutama biaya tenaga kerja.
4. Pada usaha yang sudah layak, MA menanggung jumlah biaya yang cukup tinggi, terutama untuk biaya panen dan angkut (tetapi juga menikmati margin keuntungan yang cukup besar).
5. Untuk mengatasi biaya yang menyebabkan membengkaknya usaha hutan rakyat perlu adanya perbaikan kebijakan tentang biaya administrasi dan retribusi hasi hutan serta perlu adanya perjanjian kerjasama yang lebih jelas yang disepakti bersama.

B. Saran

1. PT. PAL perlu mempertimbangkan kesesuaian jumlah bibit yang diberikan dengan luasan KTP yang diusahakan.
2. Perlu partisipasi yang lebih nyata dari pengusaha non-PAL dalam menyediakan bibit dan KTP diarahkan untuk bisa menyediakan bibit secara mandiri.
3. Potensi HR perlu diidentifikasi dengan baik, agar tidak terjadi kelebihan pasokan kayu.
4. Pembenahan prosedur administrasi dalam pengusahaan dan penatausahaan hasil hutan rakyat.
5. Penyusunan standar harga berdasarkan kualitas dan jenis kayu agar bisa menjadi insentif pengembangan hutan rakyat.
6. Perlu dibangun adanya pusat informasi harga yang dikelola oleh Pemda yang bisa diakses oleh semua pihak, termasuk petani.
7. Peningkatan teknik budidaya ditingkat petani sehingga diperlukan usaha penyuluhan yang lebih aktif dari instansi terkait.

Ucapan terimakasih

Terimakasih sebesar-besarnya kepada ACIAR-CIFOR dan FORDA atas terlaksananya kegitan penelitian *commnity partnership* di Kabupaten Bulukumba 2005-2007, dan terimaksih sebesar-besarnya kepada Ani Nawir dan Arita (CIFOR), Abdul Rohim (Dishut Kab.Bulukumba), Ahmad Rizal, Arman Hermawan, Andarias Ruru, Nurhaedah, Rini Purwanti atas segala bantuan dan partisipanya dalam pengumpulan data primer dan data sekunder.

DAFTAR PUSTAKA

Dinas Kehutanan Kabupaten Bulukumba, 2005. Rencana Master Plan/Konsepsi Pembangunan Kehutanan Kabupaten Bulukumba Menuju Tahun 2025. Bulukumba.

Dinas Kehutanan Kabupaten Bulukumba, 2005. Statistik Kehutanan Kabupaten Bulukumba. Bulukumba.

Husnan, S. dan Suwarsono., 1994. Studi Kelayakan Proyek. Edisi Ketiga. Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, Yogyakarta.

Perkins, F.C. 1994. Practical Cost Benefit Analysis: Basic, Concepts and Applications. Macmillan Education Australia Pty Ltd, Melbourne.